



AKTIVITAS PEREKONOMIAN ETNIS TIONGHOA DI SIAK SRI INDRAPURA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

Nurhaini Manungkalit^{1*}, Bunari², Asril³

Universitas Riau^{1,2,3}

manungkalitm@yahoo.com^{1*}, bunari@lecturer.unri.ac.id², asril.unri@gmail.com³

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 09 Agustus 2021

Revised 01 Januari 2023

Accepted 01 Maret 2023

Available online 30 Mei 2023

Keywords:

Economics; Tionghoa; New Orde

* Correspondence:

E-mail:

manungkalitm@yahoo.com

ABSTRACT

This research aim to discuss the economic activities of the Chinese ethnic community in Siak Sri Indrapura during the New Order (1966-1998), where at that time the space for the Chinese community in all areas in Indonesia was very limited, in combination with the issuance of Regulations that continue to narrow the space for the ethnic Chinese community in Indonesia. This research uses the historical method consisting of collecting relevant historical sources (heuristics), then the collected data sources are examined or examined for the originality of the source, both in form and content (verification), then the phase of the interpreting the historical facts that have been found (interpretation) are performed.) then the history is written of all historical facts that are sorted by time of occurrence (historiography). The aim of this research was (1) to find out what was behind the arrival of the Chinese ethnic community to Siak, (2) to find out how the economic activities of the Chinese ethnic community during the New Order era in Siak Sri Indrapura, and (3) to find out how ethnic Chinese traders in Siak Sri Indrapura are adapting to the policies enacted by the government during the New Order era.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang multikultural, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai jenis Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang terdiri dari etnis lokal dan etnis pendatang yang lahir dan tumbuh di Indonesia dan telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Etnis tersebut ialah Tionghoa, India, Arab dan bangsa lainnya. Diantara etnis pendatang tersebut, etnis Tionghoa menjadi salah satu etnis yang paling banyak di jumpai di Indonesia. Etnis Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak dahulu pada awalnya masyarakat Tionghoa datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang kain sutra, obat obatan dan lain-lain[1]. Akan tetapi masyarakat Tionghoa melihat Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan hasil alam lainnya serta letak Indonesia yang strategis untuk melakukan perdagangan, sehingga masyarakat Tionghoa memutuskan untuk tinggal di Indonesia serta membentuk kehidupan yang sesuai dengan tradisi yang dibawanya serta menghormati tradisi lokal di Indonesia [2]. Kemudian, masyarakat Tionghoa banyak yang menyebar ke seluruh nusantara dengan tujuan berdagang dan bertempat tinggal. Hingga kini, hampir di seluruh tempat di Indonesia banyak dijumpai masyarakat Tionghoa, terlebih di kota-kota besar dan hidup sebagai pebisnis terutama di bidang perdagangan dan distribusi.

Kemampuan berdagang dan bersaing masyarakat Tionghoa dalam bidang perekonomian memang tidak dapat diragukan lagi. Sejarah membuktikan bahwa orang Tionghoa telah hidup dan berkembang di Indonesia sejak dulu, karena masyarakat Tionghoa mampu bersaing di dunia bisnis. Terbukti hingga saat ini, Negara China menjadi negara produksi dan banyak melakukan ekspor ke

berbagai belahan dunia[3]. Selain itu, mereka juga memegang peranan penting dalam jaringan distribusi sehingga hasil bumi rakyat yang ada di pedalaman bisa masuk ke kota-kota dan barang dari kota-kota bisa masuk kedaerah pedalaman [4]. Hal ini membuktikan jika masyarakat Tionghoa sangat pintar dalam mencari peluang dan memiliki sifat yang ulet untuk menjalankan bisnis. Jaringan-jaringan ekonomi masyarakat Tionghoa di Indonesia juga mempengaruhi jaringan ekonomi ditingkat lokal. Pengaruh ekonomi di tingkat lokal memberikan perkembangan perekonomian terhadap daerah tersebut [5]. Seperti halnya yang terjadi di Kampung Pecinan, Kota Siak Sri Indrapura. Masyarakat Tionghoa yang bermukim di Kampung Pecinan, sudah ada sejak penghujung abad ke-19. Pada saat itu, kerajaan Siak dipimpin oleh meminta kepada para pedagang Tionghoa untuk memberikan semacam contoh nyata atau Workshop tentang bagaimana cara berniaga kepada masyarakat Siak, yang kala itu belum banyak berkembang. Sebagai imbalan, Sultan Assaids Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifudin akhirnya mengizinkan masyarakat Tionghoa tersebut untuk mendirikan bangunan sebagai tempat ibadah yang tidak jauh dari Istana Kerajaan Siak. Tempat ibadah tersebut bernama Kelenteng Hock Siu Kong [6].

Kemudian, masyarakat Tionghoa mendirikan pemukiman disekitar kelenteng tersebut, yang hingga sekarang bernama “Kampung Pecinan atau “China Town”. Masyarakat Tionghoa yang ada di Kampung Pecinan ini, hidup sebagai pedagang dan bisnis lainnya. Aktivitas yang mereka lakukan di bidang ekonomi perdagangan ditentukan oleh hubungan timbal balik dan interaksi sosial antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Masyarakat Tionghoa mampu beradaptasi dengan baik terhadap masyarakat lokal yang ada di Siak, sehingga keberadaan mereka serta tradisinya dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat Siak. Sejak dibangunnya Kelenteng Hock Siu Kong pada tahun 1898 dan adanya Kampung Pecinan atau China Town, kawasan ini berubah menjadi pusat perekonomian masyarakat sekitar, karena kawasan ini merupakan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan atau kompleks pertokoan [7] sehingga tempat ini juga disebut sebagai “Pasar Trans” pada dulunya.

Etnis Tionghoa memainkan perananan penting dalam bidang ekonomi di Siak Sri Indrapura. Hal ini mengakibatkan interaksi dan komunikasi antara masyarakat lokal di Siak dan etnis Tionghoa terjalin dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Terlebih lagi karena adanya hubungan baik antara masyarakat Tionghoa dengan Kerajaan Siak, yang kala itu dipimpin oleh Sultan Assaids Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifudin. Selama pemerintahan Sultan Assaids Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifudin berlangsung yaitu sejak tahun 1889-1908, Kesultanan Siak Sri Indrapura berkembang kemakmurannya dengan wilayah yang terbentang dari Langkat hingga Jambi. Ia juga membangun Istana kerajaan Siak yang dinamakan dengan Istana Asserayyah Alhasyimiyah. Setelah Sultan Syarif Kasim I mangkat, kesultanan Siak kemudian dipimpin oleh anaknya yaitu Sultan Syarif Kasim II yang dinobatkan pada tahun 1915 dan memerintah kesultanan Siak sampai tahun 1945. Sultan Syarif Kasim I merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga ketika bangsa Indonesia merdeka, tidak lama kemudian Sultan Syarif Kasim I berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar sepuluh ribu gulden [8].

Setelah Siak bergabung dengan Republik Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa tetap menjalankan aktivitasnya di kampung pecinaan sebagai pedagang dan melakukan interaksi yang baik dengan masyarakat lokal di Siak. Namun pada pemerintahan Soeharto, yaitu pada Orde Baru (Orba) pemerintah mulai menerapkan kebijakan asimilasi. Pada rezim ini, ruang gerak masyarakat Tionghoa sangat dibatasi. Mereka dilarang keras untuk berkecimpung di bidang politik. Mereka hanya diperbolehkan untuk berusaha di bidang perdagangan saja. Tidak hanya dibatasi ruang geraknya, tetapi identitas kebangsaan, kebudayaan, kepercayaan, dan sosial ekonomi juga dibatasi pada masa orde baru (Orba). Pada masa ini, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia, antara lain:

1. Intruksi Presiden No. 14/1967 yang berisi larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat di Indonesia.
2. Surat edaran No. 06/ Preskab/ 6/1967 yang isinya menyatakan masyarakat Tionghoa harus mengubah Namanya menjadi nama yang berbaur nama Indonesia.
3. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang pelarangan impor, penjualan, dan penggunaan Bahasa China.
4. Surat Edaran SE.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China di depan umum.
5. Peraturan Menteri perumahan No. 455.2-360/1988 yang melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas atau memperbaharui kelenteng.
6. Keputusan Presiden No.56/1996 yang bertanggal 9 Juli 1996, semua peraturan yang mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dihapuskan [9].

Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia memandang bahwa rezim orde baru (OrBa) memberikan perlakuan diskriminatif kepada golongan mereka dan membatasi aktivitas mereka. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Orde Baru melanjutkan kebijakan pembaharuannya dan memunculkan konsep Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang ditunjukkan kepada media agar tidak memberikan ruang pembahasan terhadap perbedaan. Namun dalam kenyataannya proses pembaharuan yang diimplementasikan oleh pemerintah, tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kerukunan hidup bermasyarakat dan bernegara tidak berjalan dengan baik, terkhususnya pada masyarakat Tionghoa, melainkan sebaliknya. Selama pemerintahan Orde Baru (Orba) terjadi, sentiment anti Tionghoa yang klimaksnya terjadi kerusuhan dan menimbulkan kekerasan, seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998 [10]. Walaupun etnis Tionghoa mendapatkan diskriminasi pada pemerintahan Orde Baru, namun mereka masih diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara bebas. Kebijakan ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat etnis Tionghoa, dan berhasil mendapatkan hidup yang layak, serta dapat untuk tetap mempertahankan eksistensi kebudayaan dan agama mereka di Indonesia.

Berdasarkan paparan pendahuluan tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kedatangan etnis Tionghoa ke Siak, kedua untuk mengetahui bagaimana aktivitas perekonomian etnis Tionghoa di Siak pada masa Orde Baru, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana pedagang etnis Tionghoa di Siak beradaptasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada masa Orde Baru.

RESEARCH METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis dengan tahap-tahap yaitu Pengumpulan data (Heuristik), yakni data berupa kutipan dari buku, dokumen, dan jurnal yang relevan dengan kajian penelitian dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dilakukan kritik sumber (Verifikasi) tahap ini untuk menyelidiki dan menyeleksi keaslian sumber baik isi maupun bentuknya. Selanjutnya sumber data yang telah diseleksi kemudian ditafsir (Interpretasi), dianalisis dan dihubungkan sumber sejarah yang satu dengan yang lain. Kemudian tahap terakhir ialah penulisan sejarah (Historiografi) dimana data-data sejarah yang telah diseleksi tersebut disajikan. Kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif yang tidak menggunakan statistik (nonstatistik) dan disesuaikan dengan metode penelitian sejarah.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kedatangan Etnis Tionghoa ke Siak

Latar belakang kedatangan etnis Tionghoa ke Siak Sri Indrapura menurut beberapa sumber data, sangat beragam. Menurut beberapa informan penyebab kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Siak awalnya adalah untuk melakukan perdagangan, dan untuk melanjutkan kehidupan. Awal masuknya kedatangan etnis Tionghoa ke Siak diperkirakan pada akhir abad ke-19, hal ini dibuktikan dengan adanya kelenteng Hock Siu Kiong yang dibangun pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1898 ini dibuktikan pada tulisan tahun di kaki patung yang terdapat di pintu masuk kelenteng Hock Siu Kiong. Pintu masuk awal kedatangan etnis Tionghoa ke Siak melalui Bagan Siapi-api. Masyarakat etnis Tionghoa masuk ke Siak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim I, dimana pada saat Sultan Syarif Kasim I memerintah Negeri Siak, Ia memerintahkan Tengku Ngah Sayid Hasyim dimana pada saat itu menjabat sebagai panglima perang, kemudian ditugaskan untuk mengendalikan pedagang-pedagang China yang masuk ke Bagan Siapi-api[11]. Etnis Tionghoa masuk ke Siak melalui Bagan siapi-api bukanlah penduduk yang datang langsung dari Tiongkok atau China, melainkan para perantau yang datang dari Songkhla, Thailand. Mayoritas dari mereka ialah suku Hokkian, Tiociu, Hakka dan Hainan.

Kedatangan etnis Tionghoa ke Siak mendapat tanggapan baik dari Sultan Syarif Kasim I, dalam kepemimpinannya Sultan Syarif Kasim I sangat ingin meningkatkan perekonomian di Siak, sehingga Sultan Syarif Kasim I menganjurkan rakyatnya untuk menanam pohon karet, penanaman kelapa sawit, membuka perkebunan sagu dan durian. Setelah melihat kemampuan dagang masyarakat etnis Tionghoa, ditambah pada saat itu jalur sungai Siak sangat ramai oleh pendatang dari luar daerah untuk berkunjung atau melakukan perdagangan, Sultan Syarif Kasim I kemudian meminta kepada masyarakat etnis Tionghoa untuk memberikan semacam contoh nyata kepada masyarakat Siak tentang bagaimana cara berbisnis dan berniaga yang kala itu masih kurang berkembang karena hanya fokus pada bidang perkebunan. Kemudian Sultan Syarif Kasim I memberikan Izin untuk membangun tempat ibadah yang tidak jauh dari pemukiman tempat tinggal mereka, tempat ibadah itu bernama Kelenteng Hock Siu Kiong yang selesai dibangun pada tahun 1898, dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa. Karena pada masa itu aliran sungai Siak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat Siak karena menjadi pusat perhubungan yang baik untuk transportasi orang maupun mobilitas barang sehingga aliran sungai Siak pada saat itu sangat ramai karena jalan perhubungan orang dan komoditi dagang dari Minangkabau ke bandar pelabuhan yang ada di Selat Malaka . Hal ini didukung pula oleh keberadaan pedagang masyarakat etnis Tionghoa yang berdagang disekitar bandar pelabuhan dan dikampung pecinan, sehingga pada saat itu didirikanlah kawasan jual beli yang dahulunya disebut sebagai pasar seni atau pasar trans.

Sejak kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Siak yang pada saat itu sudah mendapatkan sambutan baik dari Sultan Syarif Kasim I, sehingga keberadaan mereka juga sudah harmonis dengan masyarakat sekitar yang umumnya suku Melayu. Masyarakat etnis Tionghoa mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Sultan Syarif Kasim I juga memberikan nama suku kepada mereka dengan sebutan “Anak Hamba Raja” hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi perbedaan yang sangat mencolok diantara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat Melayu di Siak. Hubungan baik antara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat di Siak terjalin sampai masa wafat Sultan Syarif Kasim, hingga Kesultanan Siak dipimpin oleh anaknya yang bernama Syarif Kasim Abdul Jalil Syarifudin. Hubungan dan kerjasama baik yang terjalin antara masyarakat etnis Tionghoa dengan kerajaan Siak Sri Indrapura, sehingga pernah suatu waktu di bulan Januari dengan sangat tergesa-gesa, pegawai Istana datang memberitahu Sultan Syarif Kasim II dan Tengku Maharatu yang akan segera berangkat ke Medan bersama dengan Dr. Tobing, Tuan Lebai Muthalib dan dua orang polisi, dan Sultan Syarif Kasim II berangkat dengan sebuah

kapal kayu atau Tongkang milik dari seorang masyarakat Tionghoa bernama Go Sui Tjau. Sultan berangkat melalui Bengkalis dan diiringi dengan suara adzan yang dilantunkan oleh Bilal Notel, Bilal Masjid Syahubuddi [12].

Zein menyebutkan bahwa peran pedagang China di akui oleh pihak kerajaan, bahkan terkadang kerajaan menempatkan beberapa orang China sebagai penasihat perdagangan mereka, sehingga gambaran ini sedikit menjelaskan bagaimana hubungan antara pedagang China dan penguasa, sebagai salah satu simbiosis. Seperti layaknya yang terjadi di Kerajaan Siak Sri Indrapura, pedagang masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat Melayu memiliki hubungan kerjasama yang saling menguntungkan terutama dalam bidang ekonomi. Contoh kerjasama yang mereka lakukan dibidang ekonomi yaitu kegiatan jual beli dipasar trans atau pasar seni, dimana pedagang etnis Tionghoa berniaga dikawasan ini, sehingga membuka peluang lapangan kerja dibidang pengangkutan barang. Hal ini dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda setempat untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh lain yaitu ketika para pedagang etnis Tionghoa yang hendak melakukan perdagangan distribusi keluar dari daerah Siak seperti Singapura dan Malaka, sehingga para petani dan buruh kebun akan menjual hasil kebun mereka seperti tebu dan karet.

2. Aktivitas Perekonomian Etnis Tionghoa Di Siak pada masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, ruang gerak etnis Tionghoa sangat dibatasi, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang mempermasalahkan identitas mereka, bahkan tidak diperbolehkan menjalankan upacara keagamaan dan tradisi etnis mereka, selain ini tidak diperbolehkan memasuki dunia politik dan kursi pemerintahan di Indonesia. Politik Orde Baru terhadap masyarakat etnis Tionghoa mengandung dua dimensi yaitu bidang budaya dan politik. Dalam bidang budaya, rezim ini memaksa masyarakat etnis Tionghoa untuk melakukan integrasi dan asimilasi total dengan menghapuskan sekolah, organisasi, dan media Tionghoa di Indonesia. Sedangkan dalam bidang politik rezim ini memberikan kesempatan kepada masyarakat etnis Tionghoa untuk tetap melanjutkan kegiatan ekonominya, karena sadar hal mereka hilang, sehingga mereka memfokuskan kegiatan hanya pada bidang perekonomian. Mereka kemudian menggunakan kesempatan ini untuk tetap bertahan tinggal di Indonesia dengan hidup berdampingan dengan pribumi.

Masyarakat etnis Tionghoa akhirnya fokus dan mencurahkan energi mereka pada dunia usaha dan perdagangan. Sebagaimana diketahui, Warga Negara Indonesia yang berketurunan Tionghoa di Indonesia memiliki peranan ekonomi yang sangat besar. Mereka menguasai hampir 50% perekonomian di Indonesia, walaupun jumlah dari golongan mereka merupakan etnis yang paling minoritas dibanding etnis pribumi di Indonesia [13].

Berdasarkan teori ekonomi, jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia merupakan implementasi dari teori ekonomi Mikro, karena kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan ekonomi per-individu dan kelompok serta penghasilan yang mereka dapatkan dari hasil penjualan produk dan jasa yang tidak terlalu mempengaruhi tingkat pendapatan negara. Seperti halnya yang terjadi di Siak pada masa Orde Baru, kegiatan perekonomian yang mereka lakukan meliputi Produksi, Distribusi dan Konsumsi.

Kegiatan awal masyarakat etnis Tionghoa di Siak ialah bekerja sebagai penyeberangan perahu dan berdagang, dan barang yang mereka perjualbelikan ialah berupa obat-obatan tradisional China, kain brukat, keramik, minyak wangi, dan sebagainya, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan kehidupan mereka dan hubungan yang terjalin baik dengan masyarakat pribumi di Siak, sehingga kegiatan ekonomi mereka mulai mengalami perubahan seperti sebagian dari mereka ada yang mulai mengikuti kegiatan dibidang perkebunan, membuka usaha lain, bahkan ada yang mengikuti masyarakat setempat untuk

menangkap dan mengumpulkan ikan dari sungai Siak. Kegiatan berdagang ini dilakukan dipasar Siak, atau di rumah mereka.

Aktivitas perdagangan ini banyak memberikan peluang pekerjaan terhadap para pemuda, yang ingin bekerja sebagai kuli angkut, karena para pedagang banyak membutuhkan tenaga kuli untuk membantu mengangkut barang dagangan dari dermaga ke pasar atau tempat perdagangan mereka. Selain menjadi pedagang di pasar trans atau pasar seni, adapula dari mereka yang melakukan perdagangan perantara atau distributor, biasanya mereka memperjualbelikan hasil perkebunan milik masyarakat pribumi di Siak.

Pada tahun-tahun berikutnya, aktivitas perekonomian masyarakat etnis Tionghoa sudah mulai mengalami perkembangan, sebagian dari mereka ada yang mencoba mengikuti kegiatan ekonomi masyarakat pribumi, seperti contohnya, bekerja sebagai buruh kebun di perkebunan karet dan kelapa sawit. Hal ini dilakukan karena mereka merasa jika pendapatan mereka dari hasil berdagang masih kurang, sehingga untuk menambah penghasilan, sebagian dari mereka mencoba untuk bekerja menjadi buruh perkebunan, sehingga hal ini semakin meningkatkan rasa solidaritas mereka dengan masyarakat pribumi di Siak. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan kegiatan perdagangan mereka, karena yang bekerja di perkebunan adalah kaum laki-laki, dan yang melanjutkan kegiatannya perdagangan adalah kaum perempuan.

Seiring dengan berkembangnya tahun, kegiatan perdagangan mereka juga sudah semakin berkembang, jenis barang yang mereka perdagangkan juga sudah mulai berkembang, dan semakin beragam. Banyak dari mereka yang sudah memiliki tempat tinggal yang juga digunakan sebagai tempat berjualan, atau yang lebih dikenal sebagai ruko (rumah toko). Sebagian dari masyarakat etnis Tionghoa sudah berjualan di rumah mereka sendiri. Salah satu cara mereka untuk mengurangi persaingan dengan pedagang lain ialah dengan menjual barang yang berbeda, contohnya jika ada yang menjual bahan pakaian, maka pedagang lain akan menjual bahan makanan, perabotan dan seterusnya. Selain untuk mengurangi persaingan, hal ini juga mereka lakukan supaya mempermudah pelanggan dalam berbelanja. Walaupun mereka sudah berjualan di rumah mereka, akan tetapi jika hari pasar tiba, mereka juga tetap melakukan perdagangan di pasar. Selain melakukan usaha dagang, mereka juga sudah mulai mencoba untuk membuka usaha di bidang jasa, seperti salon, dan bengkel. Sehingga pada masa itu, masyarakat etnis Tionghoa sudah mulai mendominasi bidang perdagangan di Siak. Kemampuan usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa sudah tidak diragukan lagi, mereka sangat ulet dan pintar dalam melihat kesempatan yang bisa dijadikan sebagai peluang dalam menjalankan usaha dagang. Dari seluruh kegiatan ekonomi mereka, dapat disimpulkan jika kegiatan mereka mengalami perubahan yang tidak meninggalkan kegiatan awal mereka, dan mengalami perkembangan pada bidang perdagangan.

3. Adaptasi Pedagang Etnis Tionghoa di Siak Sri Indrapura Terhadap Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pada Masa Orde Baru

Pada awal era Orde Baru, terjadi kenaikan harga-harga barang di Indonesia, sehingga untuk menghadapi kenyataan tersebut, pemerintah Orde Baru mengambil berbagai tindakan kebijakan untuk mengatasi perekonomian negara. Salah satu kebijakannya adalah menggunakan etnis Tionghoa, karena pemerintah memandang jika masyarakat etnis Tionghoa memang unggul dalam bidang perekonomian, sehingga pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat etnis Tionghoa untuk berdagang, membangun perekonomian serta menarik para kreditor dan investor asing.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana berikut:

“Di bidang ekonomi perubahan penting yang dilakukan Orde Baru adalah dengan diterapkannya TAP No. XIII/MPRS/1966 tentang penyelesaian masalah ekonomi dan keuangan serta ditetapkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1968 yang menjamin keamanan modal asing di Indonesia”[14].

Dengan adanya kebijakan tersebut, semakin memberikan kemudahan terhadap para pengusaha asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, serta memperluas cakupan usaha. Oleh sebab itu sampai saat ini masyarakat etnis Tionghoa kerap dianggap sebagai orang kaya dan memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, hal ini mengundang banyak pandangan negatif dari kaum pribumi karena adanya kesenjangan sosial antara masyarakat etnis Tionghoa dengan pribumi, sehingga masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, serta para investor asing melakukan kerjasama dengan para elit kaum elit pribumi yang memiliki kekuasaan di Indonesia. Kerjasama tersebut diharapkan bisa menjadi tameng bagi masyarakat etnis Tionghoa serta para investor asing karena dipandang dapat membantu mereka dari pandangan dan prasangka buruk kaum pribumi. Kerjasama tersebut menghasilkan sikap dan tindakan yang saling mengisi antara masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, serta para investor asing dengan para pengusaha elit pribumi.

Banyaknya aksi-aksi penyerangan terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, kerusuhan-kerusuhan sebagai imbas dari dominasi mereka terhadap perekonomian yang menjadikan adanya kesenjangan sosial antara kaum pribumi dengan masyarakat etnis Tionghoa.

Pada masa akhir Orde Baru, kehidupan masyarakat etnis Tionghoa sudah mulai memiliki kebebasan, karena sudah diperbolehkan melakukan kegiatan sembahyang dan upacara keagamaan lainnya, akan tetapi untuk melakukan kegiatan ini, salah seorang dari mereka harus meminta izin terlebih dahulu, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan dari pemuda setempat. Selain itu, anak-anak mereka juga diperbolehkan mendapatkan pendidikan disekolah. Pada masa Orde Baru, ketika didaerah lain di Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa banyak mendapatkan diskriminasi dan konflik lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi di Siak. Karena sejak awal kedatangan mereka sudah disambut dengan baik oleh Kesultanan Siak, dan tujuan mereka ialah berdagang, sehingga tidak mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat pribumi Siak. Ketika pemerintah mengeluarkan banyak surat edaran terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang isinya menyatakan harus berintegrasi, mengubah nama menjadi nama yang berbau nama Indonesia, larangan penggunaan bahasa China, dll. Akan tetapi yang terjadi di Siak, sudah terlebih dahulu berintegrasi dengan masyarakat pribumi. Sebagian dari mereka sudah ada yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi dan berbaur menjadi bagian dari masyarakat Pribumi di Siak, baik secara agama maupun Suku. Sehingga nama dari anak-anak mereka memiliki nama yang berbahasa Indonesia. mereka juga sudah membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, meskipun mereka merasakan kesulitan, akan tetapi banyak dari mereka yang akhirnya mahir dalam berbahasa Indonesia dengan logat Melayu untuk komunikasi sehari-hari.

Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Siak terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah dengan tetap mempertahankan eksistensinya, sambil tetap fokus dalam menjalankan kegiatan ekonominya, dan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat di Siak, terbukti hingga saat ini masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Siak tetap bisa menjalankan kehidupan mereka, ikut menjunjung semboyan “Takkan Melayu Hilang dibumi” karena mereka merasa jika mereka adalah bagian dari masyarakat Melayu Siak.

4. Kesimpulan

Awal kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Siak, diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-19 yang pada saat itu kesultanan Siak sedang dipimpin oleh Sultan Assaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifudin. Masyarakat etnis Tionghoa yang datang ke Siak, bukanlah warga negara Tiongkok yang datang langsung dari China, melainkan dari Bagan Siapi-api yang pada saat itu masih di bawah administrasi Kesultanan Siak Sri Indrapura. Salah satu bukti sejarah keberadaan masyarakat etnis Tionghoa yang di Siak Sri Indrapura adalah adanya Kelenteng Hock Siu Kiong yang selesai dibangun pada tahun 1898. Sejak kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Siak, sudah dapat diterima dengan baik oleh warga Siak, terutama keluarga kerajaan Siak Sri Indrapura, sehingga proses adaptasi dan komunikasi dapat berjalan dengan baik hingga sampai saat ini.

Kehidupan masyarakat etnis Tionghoa pada masa orde baru di bawah rezim pemerintahan Presiden Soeharto 1966-1998, dimana masyarakat etnis Tionghoa dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, adat istiadat di Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa juga harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau nama Indonesia, pelarangan media cetak dan pers yang menggunakan bahasa China, pelarangan untuk mendirikan dan memperbaharui Kelenteng. Peraturan ini juga sampai kepada masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Siak, akan tetapi semua peraturan yang menghambat ruang gerak ini, tidak terlalu berdampak kuat terhadap kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena kondisi kehidupan mereka sejak awal kedatangan ke Siak, sudah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, sehingga ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan segala jenis larangan dan peraturan, hal tersebut tidak terlalu berdampak terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Siak. Masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Siak tidak ada yang menduduki kursi pemerintahan pada masa Orde Baru, karena pada masa itu Siak masih di bawah Administrasi Bengkalis, sehingga kursi pemerintahan hanya diizinkan untuk diduduki oleh masyarakat Melayu, juga tidak ada yang memasuki organisasi politik. Sehingga aktivitas yang bisa dilaksanakan masyarakat etnis Tionghoa pada masa Orde Baru hanya diperbolehkan untuk perdagangan, adapun aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa adalah bekerja di perkebunan sebagai buruh, dan ada juga yang bekerja sebagai nelayan di aliran Sungai Siak.

Adaptasi yang dilakukan oleh Masyarakat etnis Tionghoa terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru adalah dengan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan. Adaptasi dilakukan dengan sangat baik, terbukti hingga saat ini, keberadaan masyarakat etnis Tionghoa masih ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik dengan masyarakat setempat di Siak Sri Indrapura. Masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Siak sudah membaur bersama dengan masyarakat etnis Melayu, dimana mereka sudah ikut melestarikan budaya Melayu dan mereka juga ikut menyuarakan Petuah dari Hang Tuah yakni: "Takkan Melayu Hilang di Bumi" mereka menyuarakan demikian karena karena mereka menganggap bahwa dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, sehingga mereka menanggapi bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia dengan suku Tionghoa, dan bagian dari masyarakat Melayu yang ada di Siak.

REFERENCE

- [1] E. Sedyawati, "Tuban: Kota Pelabuhan Di Jalan Sutera. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional," 1992.
- [2] F. Muzakky, "Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi di Kota Yogyakarta," 2016.
- [3] Ongokham, *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.

- [4] M. JAMIUN, *Memupus Silang-Sengkarut Relasi Jawa-Tionghoa: Panduan Advokasi Untuk Membangun Rekonsiliasi*. Surakarta: Ciscore, 2001.
- [5] P. S. H. Karmela, *Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-orang Tionghoa Di Kota Jambi*. 2010.
- [6] R. Wijaya, *Motivasi Wisatawan Ke Chinatown Siak*. Pekanbaru: Universitas Riau, 2018.
- [7] B. Pranoto, "Merayakan Multikulturalisme Semu (Praktik Multikulturalisme di Kampung Pecinan Kelurahan Kampung Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau," 2018.
- [8] J. I. Junaidi, "Naskah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Yogyakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," 2018.
- [9] M. Tempo, *Etnis Tionghoa di Zaman yang berubah*. Jakarta: Tempo Inti Media.
- [10] M. G. Tan, *M. Tempo*. Jakarta: Gramedia, 1979.
- [11] T. P. Siak, "Sejarah Kesultanan Siak.," *Lembaya Waris. Budaya Melayu*, 2010.
- [12] H. Djamil, "Siak Negeri Pengabdianku: Bibliografi Orang Kaya Muhammad Djamil. Pekanbaru," 2016.
- [13] A. B. Zein, *Etnis Cina Dalam Potret Pembaharuan*. Jakarta: Prestasi Instan Indonesia, 2000.
- [14] W. Yeri, *Dinamika Ekonomi Politik Awal Orde Baru : 1996-1968*. Jakarta: Universitas Indonesia.